

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asikin, H. Zainal. 1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*: Jakarta. PT. Radja Grafindo Persada.
- Azhary, Tahir. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bambang S, R Joni. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: CV Pustaka Setya.
- Budiardjo, Miriam 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson. 1992 *Legal Research In A Nutshell*, St. Paul Minn West Publishing, Co.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fahrotul, Anis Fuadah, Lovina Soenmi. 2019. *Menghancurkan Solidaritas Prekatek Menghancurkan Serikat Buruh Di Indonesia 2014-2019*. Jakarta: Lokataru Foundation.
- Ginting, Jamin. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya.
- Hamid, Abdul. 2016. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harapan, A. Bazar dan Nawangsih Sutardi. 2006. *Hak Asasi Dan Hukumnya*. Jakarta: CV Yani's.
- Haryani, Sri. 2002. *Hubungan Industrial di Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hendratno, Edie Toet. 2009. *Negara Kesatuan Desentralisasi dan Federalisme*. Jakarta: Graha Ilmu Universitas Pancasila.
- Howard, Rhoda E. 2000. *HAM, Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti,.
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- I G, Wursanto. 1988. *Dasar-Dasar Manajemen Personalia (Personnel Management)*, Jakarta: Penerbit Pustaka Dian.
- Isnur, Muhammad. 2014. *Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia: Penelitian Putusan-Putusan Mahkamah Agung Pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006-2013*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Kancil. CST 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khakim, Abdul 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Koeshartono, D. dan M.F. Shellyana Junaedi. 2005. *Hubungan Industrial Kajian Konsep Dan Permasalahan, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- M.D, Mahfud. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Pascasarjan Universitas Sebelas Maret.
- Nowak, Manfred 2003. *Introduction To The Human Right Regime*. Jakarta: Martinus Nijhoff Publisher.
- Pengaribuan, Juanda 2012. *Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan dilengkapi Ulasan Hukum*. Jakarta: Muara Ilmu Sejahtera Indonesia,
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riyadi, Eko. 2012. *Kecenderungan Paradigma Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rusli, Hardijan, 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, Payaman J. 2009. *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanintijo 1985. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soepomo, Iman. 1980. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.

Sunggono, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wijayanti, Asri 2009. *Buku Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar grafika.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk berorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 1998).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan ganti Kerugian Di Perusahaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Peraturan menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2099)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309)

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri putusan Nomor 32/G/2012/PHI/PN.BDG

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 82 PK/Pdt.Sus- P HI/2016

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pal

Jurnal Ilmiah:

Budiman, Abdul Rachmat. 2016. Hak Kebebasan Bekerja Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13 No. 4.

Entah, Aloyius R. 2016. Indonesia Negara Hukum Pancasila, dalam *Seminar Hukum UNNES*, Vol.2 No.1.

Hutabarat, Restaria F. 2014. Kajian Dan Anotasi Atas Putusan 1 Telaah Kritis Pertimbangan Mahkamah Agung Terkait PHK Sebagai Cara Untuk Melakukan Union Busting (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 786 K/Pdt.Sus/2012). *Jurnal Diktum* edisi 9. LeIP.

J.P, Chessa Ario. 2018. Union Busting Sebagai Upaya Memahami Dinamika Penegakan Hukum Pidana Perburuhan: Suatu Tinjauan Studi Socio-Legal. *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 2.

Kahfi, Ashabul 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurisprudentie*. Vol. 3 No. 2.

Matompo, Osgar S. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1.

Muntoha. 2009. Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum*. Vol.16 No.3.

Pamungkas, Yogo. 2019. Efektifitas Union Busting Sebagai Tindak Pidana Kejahatan. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. Vol. 1 No. 2.

Radjab, Syamsudin. 2013. Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM. *Jurnal Sulesana*: Vol. 8 No. 2.

Riani, Sisilia Nanik. 2017. Perlindungan Terhadap Kebebasan Buruh, *Jurnal Ilmiah Unila*, Volume 4 Nomor 2.

Rumimpunu, Fritje. 2014. Sistem Hubungan Industrial Pancasila Di Indoneisia Dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat Dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2013). *Jurnal Penerbitan Unversitas Sam Ratulangi Manado*. Vol. II.

Singadimeja, M. Nurdin. 2018. Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pengurus Serikat Pekerja Dari Tindakan Union Busting. *Jurnal Hukum Positum*. Vol. 3 No. 1.

Subijanto. 2011. Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. Vol. 17 No. 6.

